

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (DPRD Kabupaten Bogor) memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Salah satu dari RKA-SKPD di DPRD Kabupaten Bogor yaitu kegiatan perjalanan dinas, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor. Perjalanan dinas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam penguatan peran dan fungsi.

Dalam menjalankan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Bogor masih menggunakan cara manual, di mana kepala pusat menunjuk pegawai untuk melakukan perjalanan dinas dengan tujuan pelatihan, pegawai yang menerima tugas pergi melakukan perjalanan dinas yang telah ditunjuk oleh kepala pusat, selanjutnya kepala dinas membuat surat perintah tugas dan surat perjalanan dinas. Surat perintah tugas yang sudah ditandatangani oleh eselon II DPRD selanjutnya dibawa bersama surat perjalanan dinas yang akan ditandatangani oleh dinas yang dituju. Setelah perjalanan dinas pegawai diharuskan membuat laporan hasil perjalanan dinas dan mengumpulkan surat perintah tugas, surat perjalanan dinas, bukti-bukti seperti nota, kuitansi dan foto yang selanjutnya diserahkan kepada bendahara untuk proses pencairan dana.

Dengan banyaknya kegiatan perjalanan dinas, maka semakin banyaknya berkas-berkas kegiatan perjalanan dinas yang menumpuk sehingga mengakibatkan rentannya kehilangan, selain itu proses perjalanan dinas yang ada sekarang terlalu menyita banyak waktu karena harus menunggu petugas terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan surat perintah tugas dan surat perjalanan dinas.

Latar belakang diatas menjadi dasar dalam pembuatan Sistem Informasi Perjalanan Dinas, yang dikerjakan di PT. Argo Cipta Persada dengan DPRD Kabupaten Bogor sebagai klien. Sistem ini sering disebut juga dengan PERJADIN. PERJADIN memfasilitasi DPRD Kabupaten Bogor dalam melakukan perjalanan dinas, membantu dalam pembuatan surat perintah tugas dan surat perjalanan dinas tanpa harus menunggu kepala pusat membuat surat, membantu menyimpan laporan hasil perjalanan dinas serta bukti-bukti yang dikumpulkan sehingga tidak ada berkas yang tercecer. Metodologi yang digunakan dalam pembuatan sistem yaitu menggunakan metodologi prototipe (Pressman 2010). Alasan menggunakan metodologi prorotipe ialah dikarenakan pihak klien yang tidak mampu menjelaskan secara detail kebutuhan dari sistem yang akan dibangun dan hanya dijabarkan secara umum. Sehingga pengembang perlu membuat Sistem Informasi Perjalanan Dinas untuk DPRD Kabupaten Bogor di PT. Argo Cipta Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1.2 Tujuan

Adapun tujuan kegiatan praktik kerja lapangan ini ialah pembuatan sistem informasi PERJADIN, yang menyediakan fitur :

1. Formulir pengajuan perjalanan dinas untuk pegawai yang akan melakukan perjalanan.
2. Pengajuan perjalanan dinas, di mana pada fitur ini pegawai dapat mengedit pengajuan sebelum pengajuan diverifikasi.
3. Realisasi perjalanan, yang akan diisi setelah pegawai melakukan perjalanan dinas.
4. Laporan hasil perjalanan dinas.
5. Pencairan dana perjalanan dinas.

1.3 Manfaat

Manfaat dari pembuatan sistem informasi PERJADIN ketika sistem telah selesai dibuat, yaitu anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas dapat melakukan pengisian formulir melalui *browser* selanjutnya dapat langsung mengunduh surat *dibrowser*, pengaju dan *user* dapat langsung mengunggah bukti perjalanan dinas, dan *fasan* hasil perjalanan dinas sampai tahap pencairan dana.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang terdapat dalam pembuatan sistem informasi PERJADIN ini, yaitu:

1. Sistem ini digunakan oleh DPRD Kabupaten Bogor.
2. Sistem ini memiliki empat akun, yakni :
 - a. *User* sebagai pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas, hanya dapat mengajukan diri sendiri.
 - b. Pengaju sebagai pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas atau sebagai pihak yang dapat mengajukan banyak pegawai untuk melakukan perjalanan dinas, biasanya ketua unit kerja.
 - c. *Verifikator* sebagai pihak yang memverifikasi pengajuan.
 - d. Admin sebagai pihak yang mengurus menu dan hak akses pada sistem.
3. Sistem ini berbasis situs web sehingga hanya dapat diakses melalui *browser*.